

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Melda Rivana¹, Irwan Gani²✉

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

² Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: irwan.gani@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu sebelas tahun dari periode tahun 2010 sampai 2020. Penelitian ini di analisis dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda. Data yang ada diolah dengan menggunakan program komputer SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 25. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Upah Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Abstract

The purpose of this paper is to determine the effect of unemployment rate, human development index, and minimum wage on poverty in East Kalimantan Province. The data used in this study is secondary data over a period of eleven years from the period 2010 to 2020. This study was analyzed using the Multiple Linear Regression analysis tool. The existing data is processed using the SPSS (Statistical Package for Social Science) computer program version 25. The results of this analysis indicate that the open unemployment rate has a positive and significant effect on the poverty rate. The Human Development Index has a positive and significant effect on poverty. Minimum Wage has a positive and insignificant effect on poverty.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Melda Rivana, Irwan Gani.

Article history

Received 2024-02-18

Accepted 2024-02-24

Published 2024-02-30

Kata kunci

Tingkat Pengangguran Terbuka;
Indeks Pembangunan Manusia;
Upah Minimum;
Kemiskinan.

Keywords

Open Unemployment Rate;
Human Development Index;
Minimum Wage;
Poverty.

1. Pendahuluan

Kemiskinan adalah persoalan penting yang dihadapi oleh banyak negara di dunia baik negara maju ataupun negara berkembang seperti Indonesia. Dengan berlimpahnya jumlah sumber daya manusia dan sumber daya alam belum dapat membuat negara Indonesia terlepas dari kemiskinan. Setiap daerah harus melakukan pembangunan secara berkelanjutan sesuai dengan prioritas daerah masing-masing agar kemiskinan dapat berkurang. Secara jangka panjang dan jangka pendek pembangunan telah digunakan untuk menetapkan tujuan pembangunan negara. Salah satu kunci pencapaian pembangunan ditandai dengan laju penurunan jumlah penduduk miskin, Simatupang and Dermoredjo (2003).

Kurangnya akses ke makanan, tingkat pendapatan yang buruk, kurangnya kesempatan kerja, dan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan semuanya berkontribusi terhadap kemiskinan dengan menurunkan standar hidup atau menghambat pemenuhan kebutuhan dasar. Tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dalam hal kesejahteraan ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual seseorang dapat dianggap miskin. Beik and Arsyanti, (2016).

Jumlah kemiskinan pada tahun 2011 sebesar 190.100 jiwa dan telah menurun di tahun 2012 menjadi 187.900 jiwa lalu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kembali naik perlahan-lahan ke angka 220.170 jiwa dan pada tahun 2018 turun kembali menjadi 218.900 jiwa. Di tahun 2019 dan 2020 jumlah kemiskinan kembali naik. Jumlah kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi selama kurun waktu 10 tahun kebelakang. Bahkan selama ini, penduduk miskin Kalimantan Timur yang fluktuatif cenderung naik dalam kurun waktu tersebut. Hal ini menjelaskan bahwasannya inisiatif pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memerangi kemiskinan selama ini tidak berdampak besar untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak bekerja sama sekali selama seminggu menjelang pencacahan atau bekerja kurang dari dua hari dianggap menganggur. Sementara itu, orang yang bekerja setidaknya dua hari seminggu dengan tujuan menghasilkan uang dianggap sebagai bekerja, Sumarsono (2003).

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi atau naik turun di setiap tahunnya. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terjadi pada tahun 2011 sebesar 9.84 persen dan tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 6.09 persen dan kembali naik pada tahun 2020 sebesar 6.87 persen.

Kualitas sumber daya manusia juga memberikan kontribusi terhadap kemiskinan. Indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia (IPM) dapat digunakan untuk menentukan kualitas sumber daya manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 hingga tahun 2020 mengalami naik turun atau fluktuasi setiap tahunnya, IPM tertinggi terjadi di tahun 2018 sebesar 75.83, tertinggi kedua terjadi pada tahun 2014 sebesar 7.82 dan IPM terendah sebesar 72.02 terjadi pada tahun 2011.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah minimum. Upah Minimum adalah penetapan upah minimum yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan upah minimum kepada buruh yang paling rendah tingkatnya, Suryahadi (2010).

Kondisi upah di Provinsi Kalimantan Timur berbeda-beda setiap tahunnya. Peningkatan angka kemiskinan dapat disebabkan oleh upah minimum yang sangat rendah. Berdasarkan data dari BPS, upah minimum Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 terus bertambah setiap tahunnya. Upah minimum tertinggi di Provinsi Kaltim terdapat pada tahun 2020 sebesar RP2.981.379,00 dan upah minimum terendah adalah sebesar Rp1.084.000,00 pada tahun 2011.

2. Metode

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dalam bentuk kurun waktu (*time series*) tahunan mulai dari tahun 2010-2020. Data yang diperlukan adalah data kemiskinan di, data presentase tingkat pengangguran, data indeks pembangunan manusia, dan data upah minimum di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2020. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi linear berganda adalah alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga model yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kemiskinan (Presentase Penduduk Miskin)

α = Konstanta Regresi

X1 = Tingkat Pengangguran Terbuka

X2 = Indeks Pembangunan Manusia

X3 = Upah Minimum

E = error

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-2.414	.977			-2.470	.043
	TPT	.265	.100	.728		2.661	.032
	IPM	3.618	.476	1.029		7.600	.000
	UM	.116	.049	.617		2.348	.051

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -2.414 + 0.256X_1 + 3.618X_2 + 0.116X_3$$

Persamaan tersebut menyatakan bahwa koefisien X1 adalah untuk TPT, koefisien X2 untuk IPM, dan koefisien X3 untuk UM. Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan fungsi regresi penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Konstanta -2.414 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel TPT, IPM, dan UM tidak mengalami perubahan (constant) maka variabel kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur akan mengalami penurunan yaitu sebesar 2.414
- 2) Berdasarkan hasil perhitungan, koefisien regresi X1 adalah 0.265 dengan arti jika TPT meningkat sebesar 1 persen maka akan menyebabkan meningkatnya kemiskinan sebesar 0.265 persen di Provinsi Kalimantan Timur dan sebaliknya menurunnya TPT sebesar 1 persen maka akan menyebabkan menurunnya Kemiskinan sebesar 0.265 persen.
- 3) Koefisien regresi X2 adalah 3.618 dengan arti jika IPM meningkat 1 persen maka akan menyebabkan meningkatnya kemiskinan sebesar 3.618 persen di Provinsi Kalimantan Timur dan begitupun sebaliknya.
- 4) Koefisien regresi X3 adalah 0.116 dengan arti jika UM meningkat 1 persen maka akan menyebabkan meningkatnya kemiskinan sebesar 0.116 persen di Provinsi Kalimantan Timur dan begitupun sebaliknya.

3.1. Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00792258
Most Extreme Differences	Absolute	.240
	Positive	.240
	Negative	-.128
Test Statistic		.240
Asymp. Sig. (2-tailed)		.077 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Pada tabel diatas dapat diketahui nilai sig. $0.077 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

3.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TPT	.125	7.983
	IPM	.511	1.956
	UM	.136	7.352

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat gejala multikolineritas. Hal ini ditunjukkan melalui nilai VIF dari variabel bebas lebih kecil < 10 dan nilai tolerance > 0.100 .

3.3. Uji Autokorelasi

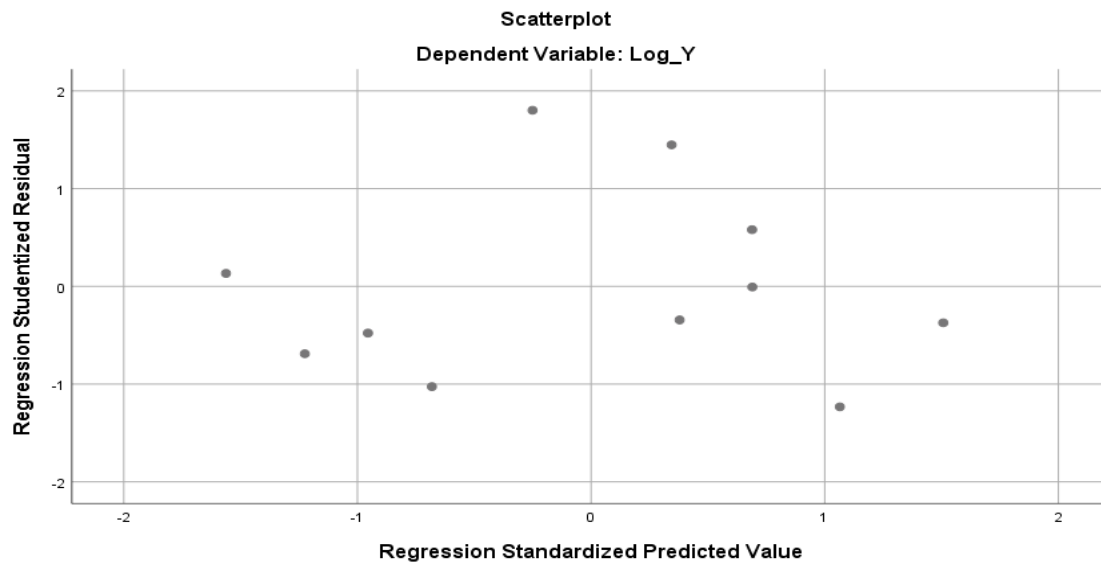
Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode Runs Test. Uji Run test adalah bagian dari pengujian nonparametik, yang digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0.05 maka terdapat gejala autokorelasi. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0.05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0.189 >$ dari 0.05 maka disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-.00249
Cases < Test Value	5
Cases \geq Test Value	6
Total Cases	11
Number of Runs	9
Z	1.312
Asymp. Sig. (2-tailed)	.189

- a. Median

3.4. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji heteroskedastisitas

Pada gambar scatterplot di atas terdapat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak ada pola yang bergelombang. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas.

3.5. Uji F (Simultan)

Berdasarkan tabel 5 hasil uji F dapat dilihat bahwasan anova atau F test nilai hitung sebesar 33.209 lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 3.86 dengan sig. 0.000. oleh karena sig. jauh lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien TPT, IPM, dan UM berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 5. Uji F

ANOVAa						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.009	3	.003	33.209	.000b
	Residual	.001	7	.000		
	Total	.010	10			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), TPT, IPM, UM

3.6. Uji t (Parsial)

Tabel 6. Uji t

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.414	.977		-2.470	.043
	TPT	.265	.100	.728	2.661	.032
	IPM	3.618	.476	1.029	7.600	.000
	UM	.116	.049	.617	2.348	.051

Dependent Variable: Kemiskinan

Tabel 6, Uji t dilakukan untuk melihat secara individual berpengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ dengan signifikansi hasil Ttabel sebesar 2.365. Berikut akan dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial:

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (X1) Terhadap Kemiskinan (Y)

Berdasarkan hasil tabel 6, menunjukkan bahwa variabel TPT (X1) t-hitung sebesar 2.661 lebih besar dari t-tabel yaitu sekitar 2.365 sehingga ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$) dan nilai sig. nya 0.032 lebih kecil dari 0.05 atau ($0.032 < 0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel TPT berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima.

H1: Tingkat Pengangguran Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kemiskinan

2) Indeks Pembangunan Manusia (X2) Terhadap Kemiskinan (Y)

Berdasarkan hasil tabel 6 menunjukkan bahwa variabel IPM (X2) t-hitung sebesar 7.600 lebih besar dari t-tabel yaitu sebesar 2.365 ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$) dan nilai sig. nya 0.000 lebih kecil dari 0.05 atau ($0.000 < 0.05$) maka dapat dikatakan bahwa variabel IPM berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima.

H2: Indeks Pembangunan Manusia Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kemiskinan

3) Variabel UM (X3) Terhadap Kemiskinan (Y)

Berdasarkan hasil tabel 6 menunjukkan bahwa variabel UM (X3) t hitung sebesar 2.348 masih lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 2.365 sehingga ($t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$) sedangkan nilai sig. nya sebesar 0.051 lebih besar dari 0.05 atau ($0.051 > 0.05$) maka dapat dikatakan bahwa variabel UM tidak berpengaruh terhadap variabel Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 di tolak.

H0: Upah Minimum Berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan Terhadap Kemiskinan

3.7. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Uji Koefisien Korelasi (R) dan Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.967 ^a	.934	.906	.00947	2.542

a. Predictors: (Constant), UM, IPM, TPT

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Berdasarkan output pada tabel 7 diketahui bahwa hubungan variabel TPT (X1), IPM (X2), dan UM (X3) terhadap Kemiskinan (Y) dari nilai R (korelasi) atau tingkat hubungan antar variabel adalah sebesar 0.967 atau sebesar 96.7% . Artinya variabel TPT, IPM dan UM secara keseluruhan mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan kemiskinan di provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan dari koefisien determinasi atau R Square (R²) yang menunjukkan nilai sebesar 0,934 atau sebesar 93.4%. Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel TPT (X1), IPM (X2), dan UM (X3) terhadap Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Timur dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD). Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh dari variabel variabel TPT (X1), IPM (X2), dan UM (X3) terhadap Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 93.4% sedangkan sisanya 6.6% dipengaruhi oleh faktor lain (faktor di luar penelitian).

3.8. Pengaruh TPT (X1) terhadap Kemiskinan (Y)

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010-2020. Artinya apabila pengangguran meningkat maka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur juga meningkat.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya daya produktif seseorang, karena tingkat pengangguran merupakan situasi dimana seseorang tidak mempunyai upah atau gaji yang berakibat

meningkatkan angka kemiskinan. Ketika seseorang tidak memiliki upah atau gaji hidupnya tidak sejahtera karena tanpa upah atau gaji seseorang akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya dengan baik dan layak. Bertambahnya jumlah angkatan kerja setiap tahun dan tidak diimbangi dengan penambahan lapangan pekerjaan juga menjadi penyebab mengapa angka pengangguran bertambah dan meningkatnya angka kemiskinan.

Ditambah dengan pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Provinsi Kalimantan Timur membuat perpindahan penduduk ke Kalimantan Timur semakin bertambah. Hal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat karena banyaknya orang-orang yang belum memiliki pekerjaan datang ke Kalimantan Timur berharap mendapatkan pekerjaan. Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) ini menawarkan kesempatan kerja di beberapa bidang, tetapi tidak dapat menampung banyaknya jumlah masyarakat yang datang dari luar wilayah IKN (Ibu Kota Negara) sehingga menimbulkan pengangguran baru dan angka kemiskinan meningkat. Masyarakat yang datang dari berbagai daerah menuju IKN (Ibu Kota Negara) membuat masyarakat asli yang berdomisili di Kalimantan Timur harus bersaing dengan masyarakat yang berasal dari berbagai daerah dengan berbagai tingkat pendidikan yang berbeda dan pengalaman yang banyak. Hal ini membuat masyarakat yang berdomisili di Kalimantan Timur harus lebih berusaha lagi untuk melepaskan status pengangguran pada dirinya.

Hal ini sesuai dengan teori Malthus yang menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja baru yang semakin banyak pula namun hal ini tidak diimbangi dengan menambah kesempatan kerja. Sehingga banyaknya permintaan tenaga kerja tidak sesuai dengan jumlah kesempatan kerja yang ada. Disisi lain bertambahnya jumlah penduduk serta adanya biaya inflasi setiap tahun menyebabkan harga kebutuhan naik yang berakibat pada meningkatnya upah. Ketika terjadi peningkatan upah perusahaan akan berusaha untuk mengurangi jumlah pekerjanya yang menyebabkan angka pengangguran semakin bertambah. Akibatnya jumlah masyarakat yang tidak berpenghasilan karena menganggur semakin bertambah dan berakibat pada meningkatnya kemiskinan karena masyarakat tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan sejahtera.

Maka dari itu tingkat pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan, jadi dengan kata lain jika tingkat pengangguran di suatu daerah meningkat maka dapat menyebabkan kemiskinan meningkat juga.

Sukirno menjelaskan (Sukirno, 2004) efek negatif yang disebabkan oleh pengangguran adalah berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Semakin turun kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan, apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, akan berdampak pada kekacauan politik dan sehingga menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, diharapkan pula pemerintah untuk lebih menggerakkan dan meningkatkan sektor informal untuk menekan kemiskinan sebab sektor informal merupakan salah satu solusi masalah dalam mengatasi pengangguran. Karena terdapat golongan masyarakat yang sedang dalam tahap menyiapkan usaha atau sektor informal atau mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja yang dimasukkan dalam golongan pengangguran.

3.9. Pengaruh IPM (X2) Terhadap Kemiskinan (Y)

Berdasarkan hasil regresi linear berganda dapat diketahui bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010-2020. Artinya, apabila IPM meningkat maka tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur juga akan meningkat, dan begitupun sebaliknya.

Menurut laporan Pembangunan Manusia tahun 2016 yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan salah satu alasan mengapa hubungannya positif antara IPM dengan Kemiskinan yaitu bahwasanya kemajuan di Indonesia belum dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat. Akibatnya adalah terjadi kesenjangan yang berdampak pada kelompok atau daerah tertentu secara tidak proporsional, Supraba (2018). Gini ratio adalah salah

satu ukuran ketimpangan pendapatan yang paling umum dipakai. Pada tahun 2020, indeks gini Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 0,335. Di kota sebesar 0.330 sedangkan di desa sebesar 0.286. Nilai gini ratio yang semakin tinggi menunjukkan semakin besar tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk.

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan tidak meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan antar wilayah terjadi, baik antara perkotaan dengan perdesaan, antar provinsi, antar kabupaten, antara kota dengan kabupaten. Menurut pemerintah provinsi Kaltim dalam Buku yang berjudul *Draft Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur* pulau Kalimantan tercatat memiliki ketimpangan wilayah yang cukup tinggi. Meskipun ketimpangan belum tentu menggambarkan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan namun tingkat ketimpangan yang cukup tinggi dapat menjadi cerminan belum meratanya tingkat pembangunan di semua wilayah, Irkham (2019).

Di pulau Kalimantan, Kalimantan Timur memberikan kontribusi ekonomi sekitar 50 persen. Meski begitu, pemerataan pembangunan kabupaten tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki banyak daerah tertinggal yang sulit diakses. Daerah tersebut dapat semakin tertinggal karena sulitnya akses, yang dapat menghambat pergerakan produk dan jasa di sana. Perbedaan wilayah antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu fenomena tersebut.

Ditambah lagi, penduduk Kalimantan Timur tidak tersebar merata di seluruh wilayah. Secara keseluruhan, 3,6 juta orang tinggal di Kalimantan Timur, namun hanya 26 ribu yang tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu (0,70 persen). Setiap daerah di Kalimantan Timur memiliki tingkat pertumbuhan pembangunan yang berbeda sebagai akibat dari variasi tersebut. Wilayah perkotaan mendominasi nilai IPM tertinggi Kalimantan Timur menurut kabupaten atau kota, dengan Kota Samarinda memiliki IPM tertinggi sebesar 79,93. IPM di ketiga kota Kaltim tersebut lebih tinggi dibandingkan IPM seluruh wilayah. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki IPM terendah, yaitu 66,67.

Menurut Ristika meskipun di suatu wilayah telah didukung oleh infrastruktur, pendidikan, dan jaminan kesehatan yang memadai, namun tidak memungkinkan jika ketimpangan di wilayah tersebut masih tinggi mengingat masih belum meratanya program pembangunan di wilayah tersebut, Ristika et al., (2021).

Jadi dapat disimpulkan, meskipun angka indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur berada dalam kategori “tinggi”, tetapi jika tingkat ketimpangannya juga tinggi maka kemiskinan juga masih tetap tinggi karena program pembangunan yang masih belum dirasakan oleh seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Dilihat dari paparan yang telah disampaikan, maka kenaikan IPM tidak selalu mempunyai korelasi yang negatif dengan jumlah penduduk miskin seperti halnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Oleh karena itu pemerintah sebaiknya memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur yang telah rusak, menambah infrastruktur seperti akses jalan menuju wilayah-wilayah pelosok agar terjadi pemerataan indeks pembangunan manusia sehingga dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.

3.10. Pengaruh UM (X3) terhadap Kemiskinan (Y)

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui bahwa variabel Upah Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor yang menyebabkan mengapa upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur adalah mayoritas pekerjaan masyarakat Indonesia termasuk di Kalimantan Timur adalah bekerja pada sektor informal. Presentase pekerja pada sektor informal di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2020 adalah sebesar 47.14 persen hampir setengahnya dari presentase pekerja pada sektor formal yaitu sebesar 52.86 persen dan upah minimum berlaku di sektor formal, tidak semua sektor informal menerapkan upah minimum. Menurut Olivier Blanchard (Blanchard & R Johnson, 2017) bahwasannya sektor informal di Indonesia masih belum bisa menyejahterakan masyarakat.

Baik penduduk lokal di Provinsi Kalimantan Timur maupun orang-orang yang pergi ke Kalimantan Timur dari tempat lain untuk mencari pekerjaan merupakan faktor yang banyak

menyebabkan bertambahnya penduduk yang menganggur. Hal ini mengakibatkan peningkatan yang terjadi pada upah minimum di Provinsi Kalimantan Timur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan karena peningkatan upah minimum tersebut hanya berdampak pada penduduk yang memiliki pekerjaan.

Penyebab lainnya adalah karena upah minimum provinsi dalam jangka panjang belum bisa menggambarkan kesejahteraan seseorang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, artinya seseorang dengan upah yang tinggi belum tentu bisa disebut sebagai orang yang berkecukupan karena kebutuhan akan hidupnya juga banyak atau melebihi upah yang didapat sehingga kenaikan upah minimum belum bisa menyejahterakan hidupnya dan adanya faktor biaya sosial inflasi yang menyebabkan tingkat harga barang dan jasa selalu meningkat sehingga menjadikan standar kebutuhan hidup layak (KHL) juga terus meningkat. Jika dikaitkan dengan biaya sosial dari inflasi, maka kenaikan upah minimum seolah-olah tidak terasa dampaknya ketika inflasi terus meningkat, jadi dapat dikatakan bahwa ketika biaya hidup terus meningkat akibat inflasi, maka upah minimum meningkat seiring dengan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat.

Dalam beberapa tahun terakhir inflasi lebih tinggi daripada pertumbuhan upah. Hal ini disebabkan oleh kenaikan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan upah sehingga menimbulkan biaya sosial dari biaya inflasi tersebut. Sedangkan, pendapatan masyarakat dari pertumbuhan upah yang diterima oleh masyarakat lebih rendah dibandingkan satuan kenaikan harga atau inflasi.

Menurut teori Keynes, dipasar tenaga kerja menganggap tinggi rendahnya penawaran tenaga kerja sebagai fungsi dari tingkat upah uang (upah nominal). Keynes berkeyakinan bahwa para pemilik input tenaga kerja selalu kena ilusi uang. Kunci untuk pendekatan ini terletak pada kenyataan bahwa upah tidak cepat menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan pasar tenaga kerja. Dan upah cenderung memberikan respon lamban terhadap setiap guncangan ekonomi. Jika tingkat upah tidak bisa untuk menyeimbangkan pasar, dapat timbul ketidaksesuaian antara para pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Ketidaksesuaian ini dapat mengarah ke pola-pola pengangguran yang dapat kita lihat saat ini. Artinya peningkatan upah tidak dapat langsung menuntaskan masalah perekonomian karena setiap meningkatnya nilai upah cenderung diikuti dengan peningkatan biaya hidup dan nilai inflasi sehingga bertambahnya nilai upah tidak langsung terasa efeknya terhadap masyarakat.

Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengawasi perusahaan terutama pada sektor informal dalam memberikan upah terhadap karyawan sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku pada tahun tersebut sehingga penduduk miskin yang bekerja akan lebih sejahtera karena mendapatkan upah yang sesuai atau layak untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Pemerintah sebaiknya mengendalikan kenaikan inflasi agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan dapat hidup dengan sejahtera.

4. Simpulan

- 1) Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya apabila pengangguran meningkat maka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur juga meningkat.
- 2) Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya, jika IPM meningkat maka tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur juga akan meningkat, demikian sebaliknya
- 3) Variabel upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya, naik turunnya upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2015). Indeks Pembangunan Manusia 2014. Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2015). Jumlah Penduduk Miskin. Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. (2015). Tingkat Pengangguran Terbuka. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Upah Minimum. Badan Pusat Statistik
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). EKONOMI PEMBANGUNAN SYARIAH (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Blanchard, O., & R Johnson, D. (2017). Makroekonomi Edisi Keenam (G. Gania (ed.); 6th ed.). Erlangga
- Irkham, M. (2019). Analisis Ketimpangan Wilayah. *Akuntabel*, 16(1), 98-110
- Ristika, E. D., Primhandana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12.
- Simatupang, P., & Dermoredjo, S. K. (2003). Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan: Hipotesis "Trickle Down" Dikaji Ulang. *Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, 51(3), 291-324.
- Sukirno, S. (2004). Makroekonomi Teori Pengantar (Ketiga). Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Graha Ilmu.
- Suryahadi. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasidan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PT Refka Aditama.
- Supraba, S. Y. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2015.
- UNDP. (2022). Human Development Index (HDI). <https://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>